

**PENGARUH *PERSONAL BACKGROUND*, *POLITICAL BACKGROUND*
DAN PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN TENTANG ANGGARAN
TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH**

(Studi Empiris Pada DPRD Kota/Kabupaten Solok)

ARTIKEL



Oleh:

DWIVA ULAN SARI

56300/2010

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2016

**PENGARUH *PERSONAL BACKGROUND*, *POLITICAL BACKGROUND* DAN
PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN TENTANG ANGGARAN
TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH**
(Studi Empiris pada DPRD Kab/Kota Solok)

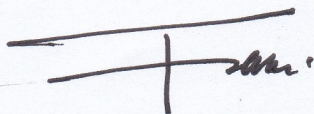
Oleh:

DWIVA ULAN SARI
2010/56300

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode
September 2016 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

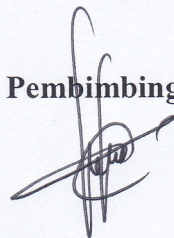
Padang, Juli 2016

Pembimbing I



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP : 19730213 1999303 1 003

Pembimbing II



Charoline Cheisviyanny, SE, Ak, M. Ak
NIP. 19801019 200604 2 002

PENGARUH *PERSONAL BACKGROUND*, *POLITICAL BACKGROUND* DAN PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Empiris Pada DPRD Kota/Kabupaten Solok)

DWIVA ULAN SARI

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
E-Mail : Dwiva.ulansari@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *personal background*, *political background* dan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode *total sampling* dan dianalisis dengan menggunakan *dummy* dan regresi berganda. Sampel dalam penelitian ini adalah DPRD Kota dan Kabupaten Solok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *personal background* dan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, sedangkan *political background* berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Kata kunci : *personal background*, *political background*, pengetahuan dewan tentang anggaran, peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

Abstract

This study aimed to examine the effect of personal background, political background and knowledge of the council members about the budget on the role of DPRD in financial supervision. The Data was collected by using total sampling method and analyzed with using dummy and double regression. The sample in this study was DPRD at city and district of Solok. The results showed that personal background and knowledge of board members about the budget does not affect the role of DPRD financial supervision, while political background influence the role of DPRD in financial supervision.

Keyword: *personal background*, *political background*, the knowledge of council members, the role of DPRD

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang mulai memasuki era baru untuk kehidupan masyarakatnya yang lebih baik maka diberlakukanlah kebijakan ekonomi daerah yang ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2001. Dimana otonomi daerah merupakan segala hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri dalam urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada saat itulah tanggungjawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri agar tercapainya tujuan menjadi jauh lebih besar. Untuk dapat menciptakan keselarasan dan keseimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu didukung dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengurus dan mengatur semua urusan yang berhubungan dengan pemerintah daerah masing-masing. Hal ini bertujuan supaya distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam nasional dapat seimbang dan merata, serta dapat tercipta kesinambungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, memberikan dampak positif bagi pihak legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) untuk melaksanakan fungsinya, yaitu sebagai pihak yang menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. pemerintah juga dituntut untuk mewujudkan *good governance* dalam melaksanakan tata pemerintahannya, sebagai syarat utamanya adalah mengutamakan akuntabilitas dan transparansi serta didukung dengan pengawasan keuangan daerah yang dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi (fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan), fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), dan fungsi pengawasan (fungsi mengawasi kinerja pihak eksekutif). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

DPRD memegang peran yang sangat besar dalam pengawasan keuangan daerah ini. DPRD mempunyai hak untuk mengontrol dalam pelaksanaan tata pemerintahan khususnya pelaksanaan anggaran untuk mewujudkan konsep *value for money* atau lebih dikenal dengan 3E (ekonomis, efisien, dan efektif), transparan dan akuntabel (Winarna dan Murni, 2007). Tetapi pada kenyataannya, masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif, yaitu masih rendahnya peran anggota DPRD dalam keseluruhan

proses anggaran (APBD), baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif (Winarna dan Murni, 2007). Oleh karena itu, program kerja yang dirancang dalam anggaran belum sesuai dengan prioritas daerah dan mengakibatkan terbuka peluang yang besar permasalahan anggaran seperti penyelewengan anggaran. Lemahnya fungsi pengawasan legislatif merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja legislatif terhadap eksekutif. Pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD dipengaruhi oleh sistem politik dan individu sebagai pelaku politik (Sastroatmodjo, 1995).

Kurangnya pengawasan DPR/DPRD terhadap anggaran dapat dilihat dari kasus dana hibah dan bantuan sosial (BANSOS) dalam APBD di sejumlah daerah rawan korupsi dan penyimpangan. Biasanya, penggunaan dana hibah dan bantuan sosial tidak jelas untuk siapa, bahkan pertanggungjawabannya juga tidak jelas. Kasus ini pun terjadi di Kota Solok, karena hasil pemeriksaan BPK tahun 2014 terhadap pengelolaan APBD Kota Solok lebih kurang Rp 6,5 Milyar, 81 penerima bantuan dana hibah tidak sesuai aturan dan ketentuan perundang-undangan. Bahkan penerima dana hibah tidak ada menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah yang diterima, sebab mereka menerima dana hibah tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima dana hibah. Kasus lain juga terjadi pada tahun 2010 yaitu KPU Kota Solok yang menerima dana hibah untuk pelaksanaan pemilu tahun 2010 dan sebagian penggunaan dana hibah tersebut jelas melanggar undang-undang dan permendagri yang dilakukan oleh KPU. Kasus ini tertuang dalam temuan BPK, mereka diberi bantuan dana hibah untuk kepentingan pemilu bukan untuk pergi jalan-jalan ke luar kota seperti dalam temuan BPK. KPU Kota Solok menggunakan dana hibah untuk *sharing* informasi keluar daerah, bahkan menelan

anggaran ratusan juta rupiah (<http://www.bakinnews.com/berita-4560-bpk-ri-temukan-indikasi-penyimpangan-dana-hibah-rp-65-miliar-di-pemko-solok.html> diakses tanggal 6 Agustus 2015).

Permasalahan tersebut dapat timbul dikarenakan kurangnya peran DPRD dalam keseluruhan proses anggaran (APBD). Salah satu fungsi dari DPRD adalah fungsi pengawasan. Dalam pendekatan behaviorisme, individu yang dipandang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu (Winarna dan Murni, 2007). Oleh karena itu untuk menelaah perilaku suatu lembaga politik yang perlu ditelaah bukanlah lembaganya, melainkan yang ditelaah adalah latar belakang individu yang menjalankan dan mengendalikan jalannya lembaga tersebut. Dalam penelitian ini yang terkait dengan perilaku individu adalah peran anggota DPRD. Latar belakang individu dalam penelitian ini adalah *personal background*, *political background*, dan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran.

Personal background merupakan variabel individu yang merupakan latar belakang individu yang melekat pada setiap individu. Dalam penelitian ini *Personal background* yang dimaksud adalah tingkat pendidikan dan usia. *Personal background* berkaitan erat dengan kualitas sumber daya setiap individu. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan suatu organisasi/ lembaga. Oleh karena itu, harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Winarna dan Murni, 2007).

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Murni dan Witono (2003) variabel *Personal background* yang meliputi strata pendidikan dan latar

belakang pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan Winarna dan Murni (2007) menunjukkan bahwa variabel *Personal background* yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan, dan latar belakang pekerjaan menunjukkan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan variabel *Personal background*, yaitu strata pendidikan berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

Political background merupakan latar belakang individu dalam tentang semua hal yang berhubungan dengan dunia politik. *Political background* dalam penelitian ini meliputi Pengalaman di DPRD dan Pengalaman Politik. Setiap anggota dewan diwajibkan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh komisi masing masing, sehingga dengan latar belakang politik setiap individu yang berbeda tersebut, menyebabkan terjadinya perbedaan. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan peran legislative, yaitu institusi politik, partai politik, karakteristik personal, pengalaman politik, dan sifat pemilih (Winarna dan Murni 2007). Menurut studi yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007), variabel *Political background* secara umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari (2012) menunjukkan bahwa variabel *Political background* yang meliputi pengalaman di DPRD, asal partai politik, dan asal komisi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Dalam penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Winarna dan Murni (2007), indikator *political background* adalah pengalaman di DPRD, pengalaman

politik, asal parpol, ideologi parpol, asal komisi. Selain variabel *personal background* dan *political background* terdapat faktor lain yang mempengaruhi peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran. Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD) (Dewi, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007) menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nasirwan (2009) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di DPRD Kota/Kabupaten Solok dan belum konsistennya hasil penelitian-penelitian terdahulu serta masih sedikitnya penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, disamping juga masih terbatasnya penelitian di sektor publik, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam pengawasan Keuangan Daerah di DPRD Kota/Kabupaten Solok “***.

II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

1. Keuangan Daerah

Pengertian keuangan adalah sebagaimana dimuat dalam ketentuan

umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 (yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah “*Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah*”.

2. Personal Background

Personal background merupakan latar belakang diri dari yang melekat pada seorang individu. Latar belakang diri ini meliputi banyak aspek antara lain seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya.

Personal background berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya

pencapaian tujuan organisasi (Winarna, 2007).

3. Political Background

Setiap lembaga (DPRD) memiliki *Political Background* seperti individu yang ada didalamnya. Karakteristik utama dari *Political Background* adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup individu, dengan kata lain *Political Background* merupakan pedoman bagi anggota DPRD dalam menjalankan peran khususnya yaitu pengawasan keuangan daerah (APBD). dalam menjalankan fungsinya yaitu pengawasan keuangan daerah (APBD).

Political Background merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung didunia politik. *Political Background* meliputi beberapa dimensi yaitu pengalaman di DPRD, latar belakang partai politik dan lain-lain (Dewi, 2011). Setiap lembaga (DPRD) memiliki *Political Background* seperti individu yang lain yang ada di DPRD. Latar belakang politik tersebut berkaitan dengan nilai yang menjadi pedoman individu dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

4. Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran

Pengetahuan dewan tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD.

Pengetahuan dewan tentang anggaran erat kaitannya dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan.

Fungsi penganggaran menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif. Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD. Dalam situasi demikian anggota DPRD dituntut memiliki keterampilan dalam membaca “anggaran” serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses anggaran di daerah sehingga DPRD dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian yang dilakukan Murni dan Witono (2003) menunjukkan bahwa strata pendidikan dan latar belakang pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan Witono dan Baswir (2003) membuktikan bahwa jenis kelamin, dan tingkat pendidikan serta pengalaman di bidang politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian empiris menurut Winarna dan Murni (2007) bahwa *political background* secara umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Serta Yulinda dan Lilil (2010) membuktikan bahwa pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) menunjukkan hubungan yang positif signifikan.

Penelitian Werimon, Ghozali dan Nazir (2007) pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap pengawasan APBD, pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD.

Hipotesis

1. Pengaruh Usia terhadap Peran APBD DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Usia merupakan salah satu faktor utama yang berperan terhadap kinerja individu dalam mengerjakan pekerjaan yang diamanahkan kepadanya. Seorang anggota organisasi yang lebih tua akan lebih berpengalaman dalam menyelesaikan pekerjaannya dibandingkan dengan anggota yang masih muda. Semakin tingginya usia seseorang akan memiliki pola pikir, perilaku dan sikap mental yang lebih matang dibandingkan dengan anggota yang masih muda dan cenderung labil terhadap perubahan-perubahan dalam pekerjaan.

Dalam lingkup pemerintahan seperti DPRD dibutuhkan orang-orang yang memiliki pengalaman yang mendalam dalam mengawasi keuangan daerah. Dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memastikan bahwa anggaran tepat sasaran dan mencapai target. Pengalaman yang dimaksud dalam hal ini tentunya dapat dilihat dari usia individu yang ada di DPRD. Secara teoritis usia berarti berapa lama manusia hidup dan menjalani kehidupannya. Usia dewasa menandakan pola pikir dan sikap mental yang baik dalam menghadapi masalah dan mencari solusi dengan pikiran tenang dan terbuka. Hal ini sangat diperlukan dalam menjalani pemerintahan khususnya dalam hal pengawasan keuangan daerah. Semakin dewasa usia seseorang yang menjadi anggota dewan maka akan semakin tinggi kemampuannya untuk turut serta berperan dalam mengawasi keuangan daerah. Maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

H1 : Usia berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Tingkat pendidikan merupakan jenjang pendidikan formal yang dimulai dari SD sampai perguruan tinggi. Karena tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap cara berpikir, sikap dan tingkah laku anggota DPRD. Cara berpikir individu dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih terstruktur dan memiliki tingkat analisa yang baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan anggota dewan di DPRD maka akan semakin bagus pola pikir dan pemahaman seorang anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai anggota dewan di DPRD, individu dituntut memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi agar tercapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang kompeten dapat melaksanakan kewajibannya dalam mengawasi keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anggota DPRD, maka pengawasan terhadap keuangan daerah akan semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2011) menemukan bukti empiris bahwa *personal background* yang terdiri dari tingkat pendidikan dan pelatihan berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan anggota dewan maka semakin tinggi pula peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah :

H2 : Tingkat Pendidikan berpengaruh Positif terhadap peran DPRD

dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

3. Pengaruh Pengalaman di DPRD Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Pengalaman merupakan suatu bekal yang baik dan akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam dunia organisasi. Seorang anggota dewan yang sudah berpengalaman di DPRD akan mengetahui apa yang harus dilaksanakan sebagai anggota dewan sesuai dengan fungsinya dalam hal mengawasi keuangan daerah. Sedangkan orang yang belum mempunyai pengalaman harus dilatih dahulu melalui pendidikan dan pelatihan supaya kompeten dibidangnya. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman yang dimiliki oleh individu sebagai anggota DPRD sangat mempengaruhi fungsi dan perannya dalam mengawasi keuangan daerah. Maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah :

H3 :Pengalaman di DPRD berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

4. Pengaruh Pengalaman di Politik Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Dalam menjalankan tugasnya anggota DPRD diharuskan mengikuti aturan kerja yang telah ditetapkan sesuai bidang masing-masing, disinilah latar belakang politik terkadang menyebabkan perbedaan sudut pandang bahkan terjadinya perselisihan. Seorang anggota dewan harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan. Semakin seorang DPRD memiliki pengalaman politik yang lebih baik maka pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah (APBD)

akan semakin berkualitas dan baik. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengalaman politik berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah :

H4 : Pengalaman Politik berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)

5. Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Pengetahuan dewan tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggung jawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD.

Ryadi dan Pratolo (2009), meneliti pengetahuan anggaran dan efektivitas partisipasi dalam hubungannya dengan kepuasan atas pelaksanaan anggaran kinerja. Variabel independennya adalah pengetahuan anggaran dan variabel independen dalam penelitian tersebut adalah efektivitas partisipasi dan kepuasan atas pelaksanaan anggaran kinerja. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran masih rendah, pengetahuan anggaran dan efektivitas partisipasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan atas pelaksanaan anggaran kinerja. Semakin tinggi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka akan semakin tinggi pula peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah :

H5 : Pengaruh Anggota Dewan tentang Anggaran berpengaruh positif terhadap Peran DPRD dalam

pengawasan keuangan daerah (APBD)

III. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini menggunakan metode *total sampling*, sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD periode 2014-2019 di Kota dan Kabupaten Solok dengan jumlah 20 anggota dewan di Kota Solok dan 35 anggota dewan di Kabupaten Solok. Metode pengumpulan data responden dilakukan dengan *survey*, yaitu dengan menggunakan kuesioner dengan cara memberikan daftar pernyataan tertulis kepada responden.

Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Uma Sekaran, 2003). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Pengawasan keuangan daerah (APBD). Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap anggaran yang mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar eksekutif dalam hal ini adalah DPRD untuk mengawasi anggaran.

2. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik pengaruh positif maupun negatif. Variabel independen (X) yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a) *Personal background (X₁)*

Personal background merupakan latar belakang pribadi seseorang yang melekat pada masing-masing individu

seperti tingkat pendidikan, dan latar belakang pekerjaan. Dimensi tersebut didasarkan pada penelitian yang dikembangkan oleh Pramita dan Andriyani (2010).

b) *Political Background* (X_2)

Nurul (2013) menjelaskan bahwa Negara merupakan salah satu budaya politik yang berupa sebuah pola orientasi spesifik dalam lembaga politik yang ada di sebuah Negara. *Political Background* merupakan pola dari individu yang berhubungan dengan kehidupan politik dalam suatu sistem politik. *Political Background* merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik.

c) Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran (X_3)

Pengetahuan dewan tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD).

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Menurut Sugiyono (2008:133) dengan skala likert variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Dan penelitian ini juga menggunakan metode *dummy*

yaitu dengan memberikan skor 0 pada < 5 tahun dan skor 1 pada > 5 tahun.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Sebelum dilakukan pengujian data secara statistik dengan lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pendeskripsian terhadap variabel penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel Y nya adalah pengawasan keuangan daerah.

Dari hasil olahan data dapat dilihat untuk variabel X_1 diketahui besarnya nilai mean adalah 42,20 dengan standar deviasi 6,26836, nilai maximum sebesar 54, nilai minimum sebesar 27. Untuk variabel X_2 diketahui nilai mean 2.3250 dengan standar deviasi 1.18511; nilai maximum 5; nilai minimum sebesar 1. Untuk variabel X_3 diketahui nilai mean 0.4000 dengan standar deviasi 0.49614; nilai maximum 1; nilai minimum sebesar 0; Untuk variabel X_4 diketahui nilai mean 0.9500 dengan standar deviasi 0,22072; nilai maximum 1; nilai minimum sebesar 0. Untuk variabel X_5 diketahui nilai mean 37.6750 dengan standar deviasi 1.55889; nilai maximum 42; nilai minimum sebesar 35. Untuk variabel Y dengan nilai mean 42.5250; dengan standar deviasi 1.64843; yang nilai maximum 45; nilai minimum sebesar 37.

Uji Validitas

Dari print out SPSS versi 16 dapat dilihat dari *Corrected item-total Correlation*. Jika r_{hitung} kecil dari r_{tabel} , maka nomor item tersebut tidak valid, sebaliknya jika r_{hitung} besar dari r_{tabel} maka item tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Pada uji Validitas dalam penelitian ini r_{tabel} dari $N=40$ adalah 0,339 X_5 dan Y r_{hitung} nya $> r_{tabel}$ nya.

Dari data di atas dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total*

Correlation untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen instrumen Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) (Y) diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,466 dan untuk Instrumen Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X₅) nilai terkecil 0,454. Sementara R_{tabel} memiliki nilai 0,339. Jadi dapat dikatakan bahwa semua data yang diteliti dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan hasil yang konstan. Nilai reliabilitas dinyatakan reliabel, jika nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing instrumen pernyataan lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2006). Dari nilai *cronbach's alpha* dapat disimpulkan bahwa instrumen pertanyaan adalah reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's alpha* lebih dari 0,6.

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* untuk instrumen Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) (Y) 0,817 dan untuk instrument Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X₅) 0,878. Data ini menunjukkan nilai yang berada pada kisaran diatas 0,8. Dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum data diolah dengan regresi sederhana maka dilakukan uji asumsi klasik untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh beserta variabel penelitian layak untuk diolah lebih lanjut. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri atas :

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam uji data penelitian datanya terdistribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan model *Kolmogorof Smirnov (KS)*, dengan melihat perbandingan nilai signifikansi yang dihasilkan > 0.05 maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikansi yang dihasilkan < 0.05 maka data tidak terdistribusi secara normal.

Dari hasil pengolahan SPSS versi 16.0 didapat bahwa nilai seluruh variabel dari *kolmogorov smirnov* $> 0,05$, yaitu 0,230. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data berdistribusi secara normal.

Uji Multikolonieritas

Gejala multikolonieritas ditandai dengan adanya hubungan yang kuat di variabel independen dalam suatu persamaan regresi. Apabila dalam suatu persamaan regresi terdapat gejala multikolonieritas maka akan menyebabkan ketidakpastian estimasi, sehingga kesimpulan yang diambil tidak tepat. Model regresi yang dinyatakan bebas dari multikolonieritas apabila nilai VIF < 10 dan *Tolerance* $> 0,10$.

Untuk menguji adanya multikolonieritas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 dan *tolerance* > 0.1 . Variabel Usia (X₁), Tingkat Pendidikan (X₂) Pengalaman di DPRD (X₃), Pengalaman Politik (X₄) dan Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X₅) dengan nilai masing masing VIF 1.636, 1.101, 1.216, 1.466 dan 1.099 adalah nilai VIF yang kecil dari 10, dan nilai *tolerance* adalah 0.611, 0.908, 0.822, 0.682, 0.910 $> 0,1$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lainnya, atau variabel independent pada penelitian ini bebas multikolonieritas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model tersebut

terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas pada penelitian ini digunakan uji *gletser*. Pada uji ini apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Model yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas.

Berdasarkan data yang diolah dapat dilihat bahwa nilai sig variabel-variabel $> 0,05$ ($\text{sig} > 0,05$), untuk usia bernilai 0,997, untuk tingkat pendidikan bernilai 0,399, untuk pengalaman di DPRD bernilai 0,192, untuk pengalaman politik bernilai 0,221 dan untuk pengetahuan anggota dewan tentang anggaran bernilai 0,067 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada penelitian ini.

Uji Koefisien Determinasi

Uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel terikat atau mengukur berapa besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model, sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang tidak diteliti.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* menunjukkan 0,273. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu Usia, tingkat pendidikan, pengalaman di DPRD, pengalaman di politik dan Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap variabel terikat yaitu peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah sebesar 27,3 % sedangkan 71,7% ditentukan oleh faktor lain diluar model.

Uji Regresi Berganda

Analisis data untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi

berganda digunakan untuk memberikan penjelasan tentang aplikasi spss versi 21 yang telah ditransformasikan kedalam variabel penelitian.

Dari hasil pengolahan data SPSS, didapat nilai sig sebesar $0,018 < 0,05$ sehingga model regresi yang dipakai dapat digunakan. Dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 37,511 - 0,075 (X_1) - 1,148 (X_2) + 2,124 (X_3) - 0,861(X_4) + 0.265 (X_5)$$

Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta (α)
Nilai konstanta sebesar 37,511 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu usia, tingkat pendidikan, pengalaman di DPRD, pengalaman di politik dan pengetahuan anggota dewan terhadap anggaran adalah nol maka nilai kualitas peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah adalah sebesar konstansta (10,067).
- b. Koefisien Regresi usia (X_1)
Koefisien Usia sebesar - 0,075 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Usia satu satuan akan mengakibatkan penurunan peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah sebesar 0,075 satuan.
- c. Koefisien regresi tingkat pendidikan (X_2)
Koefisien tingkat pendidikan sebesar - 1,148 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan tingkat pendidikan satu satuan akan mengakibatkan penurunan peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah sebesar 1,148 satuan.
- d. Koefisien regresi pengalaman di DPRD (X_3)
Koefisien pengalaman di DPRD sebesar 2,124 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pengalaman di DPRD satu satuan akan mengakibatkan peningkatan peran

- anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah sebesar 2,124 satuan.
- e. Koefisien regresi pengalaman politik (X_4)
Koefisien pengalaman di politik sebesar -0,861 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pengalaman di politik satu satuan akan mengakibatkan penurunan peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah sebesar 0,861 satuan.
- f. Koefisien pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X_5)
Koefisien pengetahuan anggota dewan terhadap anggaran sebesar 0,265 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pengetahuan anggota dewan terhadap anggaran satu satuan akan mengakibatkan peningkatan peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah sebesar 0,265 satuan.

Uji Hipotesis

Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji secara serentak pengaruh terhadap variabel terikat. Dengan kriteria pengujian adalah: jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $sig. < \alpha (0,05)$, maka hal ini berarti variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $sig. > \alpha$, maka hal ini berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak mampu menjelaskan variabel terikat.

Hasil pengolahan data menunjukkan F_{hitung} yaitu sebesar 3,027 dan nilai signifikan pada 0,000 ($sig. 0,000 < 0,05$) menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen, berarti model *fix* digunakan untuk uji t statistik yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Uji t

Berdasarkan hasil olahan data statistik dapat dilihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel

dependen secara parsial, adapun pengaruhnya adalah sebagai berikut:

- a. Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig. < \alpha 0,05$. Nilai t_{tabel} pada $\alpha 0,05$ adalah 2.036933. Untuk variabel usia anggota dewan (X_1) nilai t_{hitung} adalah 1.028 dan nilai sig adalah 0,315. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,028 < 2,036933$ atau nilai signifikansi $0,315 > \alpha 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai negatif yaitu -0,075. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan bahwa usia anggota dewan (X_1) tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Sehingga hipotesis pertama dari penelitian ini ditolak.
- b. Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig. < \alpha 0,05$. Nilai t_{tabel} pada $\alpha 0,05$ adalah 2.036933. Untuk variabel tingkat pendidikan anggota dewan (X_2) nilai t_{hitung} adalah 3,347 dan nilai sig adalah 0,003. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,347 > 2,036933$ atau nilai signifikansi $0,003 < \alpha 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai negatif yaitu -1.148. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan anggota dewan (X_2) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Sehingga hipotesis kedua dari penelitian ini ditolak.
- c. Pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig. < \alpha 0,05$. Nilai t_{tabel} pada $\alpha 0,05$ adalah 2.036933. Untuk variabel pengalaman di DPRD (X_3) nilai t_{hitung} adalah 2,554 dan nilai sig adalah 0,018. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu

- 2,554 > 2,036933 atau nilai signifikansi $0,018 < \alpha 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_3 bernilai positif yaitu 2,124. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan bahwa pengalaman di DPRD (X_3) berpengaruh signifikan dan positif terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Sehingga hipotesis ketiga dari penelitian ini diterima.
- d. Pengujian hipotesis keempat dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Nilai t_{tabel} pada $\alpha 0,05$ adalah 2.036933. Untuk variabel pengalaman di politik (X_4) nilai t_{hitung} adalah 0,483 dan nilai sig adalah 0,634. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,483 < 2,036933$ atau nilai signifikansi $0,634 > \alpha 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_4 bernilai negatif yaitu -0,861. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan bahwa pengalaman di politik (X_4) tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Sehingga hipotesis keempat dari penelitian ini ditolak.
- e. Pengujian hipotesis kelima dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Nilai t_{tabel} pada $\alpha 0,05$ adalah 2.036933. Untuk variabel pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X_5) nilai t_{hitung} adalah 1,008 dan nilai sig adalah 0,324. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,008 < 2,036933$ atau nilai signifikansi $0,324 > \alpha 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_5 bernilai positif yaitu 0,625. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X_5) tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Sehingga

hipotesis kelima dari penelitian ini ditolak.

Pembahasan

1. Pengaruh Usia Anggota Dewan Terhadap Peran Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia anggota dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penelitian mendapatkan bukti empiris tentang usia anggota dewan tidak dapat mempengaruhi baik atau buruknya peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah pada Kota/Kabupaten di Solok.

Hal ini sesuai dengan Wito (2003) mengatakan bahwa "*personal background* termasuk usia, jenis kelamin dan strata pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Tidak berpengaruhnya variabel ini dikarenakan dalam meningkatkan kemampuan anggota dewan biasanya dengan mengikutsertakan anggota dewan ke dalam seminar-seminar ataupun *workshop* dan usia bukan menjadi halangan ataupun kekuatan bagi seorang anggota dewan untuk mengembangkan potensi, oleh karena itu usia tidak mempengaruhi baik atau buruknya peran anggota dewan dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Apriandi, dkk (2008) dalam halnya *personal background* yang dimiliki anggota dewan, seperti usia, jenis kelamin, strata pendidikan, *basic* pendidikan dan pengalaman politik, hanya strata pendidikan dan pengalaman di politik yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran anggota dewan dalam

pengawasan keuangan daerah. Selebihnya seperti usia dan jenis kelamin tidak mempengaruhi peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Sama halnya dengan peneliti, bahwa dikemukakan disana tidak berpengaruh variabel tersebut dikarenakan usia dan jenis kelamin bukan hal vital dalam menentukan kapabilitas anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *personal background* melalui usia tidak dapat mempengaruhi baik atau buruknya peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah.

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan Anggota Dewan Terhadap Peran Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan bukan merupakan faktor yang mempengaruhi pengawasan keuangan daerah di Kantor DPRD Kota/Kabupaten Solok.

Pada dasarnya tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan formal dan baku mulai dari jenjang SD sampai dengan perguruan tinggi dan pendidikan non formal. Tingkat pendidikan sering dikaitkan dengan tingkat intelegensi individu. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki akan semakin menunjukkan tingkat kecerdasan individu. Dalam sebuah organisasi khususnya DPRD, tingkat pendidikan yang dimiliki anggota dewan sangat penting diperhatikan karena tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tingkah laku mereka dalam melakukan suatu aktivitas. Semakin tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para anggota DPRD

menandakan bahwa anggota dewan memiliki pola pikir yang matang dan tingkat kecerdasan yang tinggi dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah. Melalui pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dengan baik maka akan terciptanya *good governance*.

Dalam penelitian ini menunjukkan bukti bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Ini bukan berarti bahwa tingkat pendidikan sepenuhnya tidak mempengaruhi peran anggota dewan dalam menjalankan tugasnya mengawasi keuangan daerah, tetapi tingkat pendidikan bukan merupakan faktor yang paling besar berpengaruh terhadap keuangan daerah. Terdapat beberapa faktor lain yang penting dan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mengawasi keuangan daerah di DPRD Kota/Kabupaten Solok.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Winarna dan Sri Murni, (2007), yang meneliti pengaruh *personal background*, *political background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, sebagai variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah pengawasan keuangan daerah, variabel independen adalah *personal background*, *political background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran. *Personal background* yang diteliti dalam penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, bidang pendidikan dan latar belakang pekerjaan secara keseluruhan. Hasil dari penelitian tersebut secara umum menunjukkan bahwa *personal background dan political background* secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang

dilakukan oleh Kartikasari (2012) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

3. Pengaruh Pengalaman di DPRD Terhadap Peran Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bahwa pengalaman di DPRD memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini terlihat dari hasil regresi yang dijelaskan sebelumnya sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin lama pengalaman anggota dewan menjabat di DPRD maka akan semakin baik pula perannya dalam pengawasan keuangan daerah pada kota/kabupaten di Solok.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Dewi (2012), bahwa semakin lama seseorang menjadi anggota DPRD maka semakin besar pula pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana juga penelitian yang dilakukan Kartikasari (2012) yang menyatakan hasil penelitian yang sejalan dengan hasil penelitian ini, yaitu menyatakan bahwa pengalaman di DPRD berpengaruh signifikan dan positif terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah.

Banyaknya pengalaman yang diperoleh anggota dewan selama berada di DPRD akan sangat membantu dewan dalam mengontrol dan mengawasi keuangan daerah. Selain itu pengalaman politik juga merupakan faktor penting yang bisa membantu dewan lebih mengerti bagaimana mengawasi keuangan daerah (murni, 2007). Dan dapat

disimpulkan bahwa semakin lama seseorang mempunyai pengalaman di DPRD maka semakin baik peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah.

4. Pengaruh Pengalaman Politik Terhadap Peran Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengalaman politik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya melalui hasil regresi yang memperlihatkan pengaruh yang tidak signifikan. Kesimpulannya semakin lama ataupun sedikitnya pengalaman politik anggota dewan tidak mempengaruhi baik atau buruknya peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah pada kota/kabupaten di Solok.

Hasil penelitian didukung oleh penelitian yang dilakukan Jaka dan Sri (2007) yang menyatakan bahwa pengalaman politik tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. hal tersebut terjadi karena di dalam pengawasan anggaran pengaruh pengalaman politik tidak terlalu signifikan karena tidak semua pengalaman politik yang sesuai dengan pengawasan keuangan daerah. maka dari itulah pengalaman politik tidak signifikan terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah.

Indah (2011) menyatakan *Political background* merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Berbicara mengenai politik, tentu saja tidak lepas dari partai politik. Setiap lembaga (DPRD) memiliki *political background* seperti individu yang ada

didalamnya. Karakteristik utama dari *political background* adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup individu.

Dalam menjalankan tugasnya anggota DPRD diharuskan mengikuti aturan kerja yang telah ditetapkan sesuai bidang masing-masing, di sinilah latar belakang politik terkadang menyebabkan perbedaan sudut pandang bahkan terjadinya perselisihan. Seorang anggota dewan harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indah (2011) menyatakan bahwa *political background* tidak berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Dan dapat disimpulkan lama atau tidaknya seorang anggota dewan memiliki pengalaman di bidang politik tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah.

5. Pengaruh Pengetahuan Anggota dewan Terhadap Anggaran Terhadap Peran Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan anggota dewan terhadap anggaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya melalui hasil regresi yang memperlihatkan pengaruh yang tidak signifikan.

Pada dasarnya pengetahuan dewan tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai

pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD. Menurut Yudono (2000) DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah/APBD salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Untuk meningkatkan kinerja dalam pengawasan keuangan daerah, DPRD harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Untuk itu, pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh anggota DPRD.

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dukungan undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, khususnya pengelolaan keuangan daerah tidak dapat berjalan dengan baik apabila mekanisme pengawasan dan pengendalian dari institusi terkait tidak berjalan.

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan

secara langsung dan tidak langsung serta *preventif* dan *reprersif*. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri ditempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya. Pengawasan *preventif* dilakukan melalui *pre-audit* yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan *represif* dilakukn melalui *post-audit* dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak memiliki pengaruh langsung terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Dan ini dibuktikan dengan hasil dari penelitian ini yang menguji pengaruh langsung antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dan peran anggota dewan dalam pengawasan keuang daerah tidak memiliki hubungan yang signifikan mungkin karena anggota dewan belum melakukan pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16).

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Usia tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah di Kota/Kabupaten Solok.
2. Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap

peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah di Kota/Kabupaten Solok.

3. Pengalaman di DPRD berpengaruh signifikan dan positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah di Kota/Kabupaten Solok.
4. Pengalaman politik tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah di Kota/Kabupaten Solok.
5. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah di Kota/Kabupaten Solok.

Saran

1. Pada saat pemberian kuisisioner, peneliti menemui kendala untuk bertemu langsung dengan responden. Sehingga kuisisioner yang disebar peneliti ada kemungkinan diisi oleh pegawai lain. Hanya beberapa responden dari beberapa perusahaan saja yang bersedia untuk bertemu dan mengisi kuisisioner yang diberikan oleh peneliti.
2. Variabel yang diuji baru sebagian kecil dari sekian banyak variabel yang berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, sebaiknya diteliti variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah.
3. Sampel dari penelitian ini juga dapat diperluas pada kota-kota besar lainnya, sehingga hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, H. Pramono, (2002). "*Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tesis S2*

- Tidak di Publikasikan".Malang: Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya.
- Andriani, 2002, *Pengaruh Pengetahuan RPPs terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD se-Propinsi Bengkulu*, Tesis Program Pasca Sarjana UGM, Jogjakarta
- Apriandi, dkk, 2008. *Personal Background, Political Background dan Masyarakat Transparansi Indonesia*. Jakarta.
- Dewi, Mustika, Indah. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi UNPID
- Fitri Amalia, Nurul. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Purworejo)*. Universitas Negeri Semarang
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul, 2004. "*Auditing 1 Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan*". Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- <http://www.bakinnews.com/berita-4560-bpk-ri-temukan-indikasi-penyimpangan-dana-hibah-rp-65-miliar-di-pemko-solok.html>. 6 Agustus 2015
- Ilham, A. 2011, 9 September. *Anggaran Pemeliharaan Dua Mobil Dinas Ambo Dalle Kuras Rp 22 Juta*. Sindonews.com (Online), halaman 3.
- Tersedia :
<http://www.sindonews.com>. 9 Oktober 2015
- Kartikasari. 2012. *Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali)*.Accounting Analysis Journal.Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Keputusan Menteri Dalam Negri No. 29 Tahun 2002 *Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran (APBD)*
- Keputusan Presiden No. 74 Pasal 16 Tahun 2001 *Tentang "Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah"*
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi Offest
- Nanag. 2013. "*Pengawasan Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah No 16 Pasal 55 Tahun 2010 *tentang "Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tugas Badan Anggaran DPRD"*
- Pramita, Yulinda Devi dan Andriyani, Lilik. 2010. *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu)*. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Purwokerto

- Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022)*
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Saragih. 2003. *Good governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia*, Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2011. *“Metodologi Penelitian Untuk Bisnis”*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat
- Sopannah dan Mardiasmo. 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan daerah. Simposium Nasional Akuntansi VI*. Suarabaya
- Sopannah dan Wahyudi, Isa. 2007. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap hubungan antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan keuangan Daerah (APBD). Jurnal Akuntansi*
- Sukabumi. (2013, 30 september). *Meski Baru Diperbaiki Oleh Kontraktor Jalanan di Sukabumi Rusak Lagi*. galamedia.com (Online), halaman 1. Tersedia : <http://www.klil-galamedia.com>. 30 September 2013
- Sunarno dan siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika
- Undang-undang No.20 tahun 2003. Tentang “*sistem pendidikan nasional*”
- Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang “*Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*”
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, BAB VII. Bagian Kesatu tentang “*Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota*”
- Werimon, Simson, Ghozali, Imam dan Nazir, Mohamad. 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar
- Winarna, jaka dan Murni, Sri. 2007. *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Surakarta : Universitas sebelas Maret
- Wito. 2003. *Pengaruh Personal Background dan Political Culture Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Tesis. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada
- Witono, Baswir, Murni, Banu. 2003. *Pengaruh Personal Background dan Political Culture Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan*

Keuangan Daerah. Tesis.
Yogyakarta : Universitas Gajah
Mada

LAMPIRAN

Analisis Data Penelitian

1. Statistic Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
USIA	40	27.00	54.00	42	6.26836
T.PEND	40	1.00	5.00	2	1.18511
PENG.DPRD	40	.00	1.00	.4000	.49614
PENG.POLITIK	40	.00	1.00	.9500	.22072
PADTA	40	35.00	42.00	37.6750	1.55889
PADDPKD	40	37.00	45.00	42.5250	1.64843
Valid N (listwise)	40				

2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.53903778
	Absolute	.164
Most Extreme Differences	Positive	.077
	Negative	-.164
Kolmogorov-Smirnov Z		1.039
Asymp. Sig. (2-tailed)		.230
a. Test distribution is Normal.		

3. Uji Multikolinaritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	37.316	6.477		5.762	.000		
	USIA	-.025	.054	-.095	-.465	.645	.611	1.636
	T.PEND	-.463	.234	-.333	-1.981	.056	.908	1.101
	PENG.DPRD	.631	.587	.190	1.076	.289	.822	1.216
	PENG.POLITIK	-.347	1.448	-.046	-.240	.812	.682	1.466
	PADTA	.197	.177	.186	1.110	.275	.910	1.099

a. Dependent Variable: PADDPKD

4. Uji Heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.134	1.967		2.102	.043
	USIA	5.344E-5	.016	.001	.003	.997
	T.PEND	-.061	.071	-.138	-.854	.399
	PENG.DPRD	-.237	.178	-.226	-1.330	.192
	PENG.POLITIK	.548	.440	.232	1.247	.221
	PADTA	-.102	.054	-.305	-1.891	.067

a. Dependent Variable: ABS

5. Uji F Statistik

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	55.003	5	11.001	3.027	.032^a
Residual	79.962	32	3.635		
Total	134.964	37			

a. Predictors: (Constant), PADTA, PENG.DPRD, PENG.POLITIK, T.PEND, USIA

b. Dependent Variable: PADDPKD

6. Uji Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.638^a	.408	.273	1.90647

a. Predictors: (Constant), PADTA, PENG.DPRD, PENG.POLITIK, T.PEND, USIA

b. Dependent Variable: PADDPKD

7. Uji Hipotesis

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	37.511	9.383		3.998	.001
USIA	-.075	.073	-.226	-1.028	.315
T.PEND	-1.148	.343	-.619	-3.347	.003
PENG.DPRD	2.124	.832	.479	2.554	.018
PENG.POLITIK	-.861	1.784	-.101	-.483	.634
PADTA	.265	.263	.177	1.008	.324

a. Dependent Variable: PADDPKD